



Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar

Bella Monisa

Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Email : monisabella2001@gmail.com

Dadang Mashur

Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau,

Email : dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

Abstrak

Aset negara adalah sumber daya ekonomi yang digunakan secara optimal. Selain itu dapat memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara, aset yang dimanfaatkan akan terpelihara sehingga biaya pemeliharaan dapat dihemat. Oleh karena itu Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah supaya mengoptimalkan dalam mengelola barang milik daerah terutama dalam hal penatausahaan. Akan tetapi banyak di temukan aset kendaraan dalam kondisi rusak setiap masing-masing organisasi perangkat daerah Kabupaten Kampar. Aset yang tidak produktif tersebut pada akhirnya akan menimbulkan persoalan baru, karena aset kehilangan nilai produktifnya dan berdampak kepada potensi ekonomi dan akan semakin membebani keuangan daerah Kampar. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards yang menggunakan 4 indikator, yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian adalah kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi kepada informan-informan yang terlibat melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan barang milik daerah belum optimal dibuktikan lemahnya penatausahaan dan inventaris administrasi Dokumen baik secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi website SIPKD modul aset. Selanjutnya belum optimal sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Manajemen Aset, Keuangan

Abstract

State assets are economic resources that are used optimally. In addition to being able to provide Non-Tax State Revenue (PNBP) to the state, the assets used will be maintained so that maintenance costs can be saved. Therefore, Kampar Regency issued Kampar Regency Regional Regulation Number 14 of 2017 concerning management of regional property so that it optimizes managing property area, especially in terms of administration. However, many vehicle assets were found in damaged condition in each regional apparatus organization of Kampar Regency. These unproductive assets will eventually cause new problems, because assets will lose their productive value and have an impact on economic potential and will increasingly burden the Kampar area's finances. This study uses the theory of George C. Edwards which uses 4 indicators, namely communication, human resources, disposition and bureaucratic structure. The research method is qualitative using data collection techniques by

observation, interviews and documentation to the informants involved through a purposive sampling technique. The results of this study found that the management of regional property was not optimal as evidenced by the weak administration and administrative inventory of documents both manually and by using the asset module SIPKD website application. Furthermore, superior and quality human resources have not been optimal.

Keywords: Policy, Implementation, Asset Management, Finance

1. PENDAHULUAN

Aset negara adalah sumber daya ekonomi yang harus digunakan dengan optimal. Selain dapat memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara, aset tersebut juga dimanfaatkan akan terpelihara sehingga biaya pemeliharaan dapat dihemat. Peduli kepada aset negara kepada keuangan negara merupakan sebuah bentuk kepedulian kepada negara yang mengimplementasi dari cinta kepada negeri.(Dadang et al., 2019).

Dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah di dalam penelitian ini berpedoman terhadap bidang penatausahaan Barang Milik Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2017 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini didasarkan kepada proses penatausahaan barang milik daerah yang menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kampar. Tingkat keberhasilan dalam proses pengelolaan barang milik daerah, ditinjau dari proses pelaksanaan penatausahaan yang akuntabel dan efektif.

Aset dalam kondisi rusak berat paling terbanyak di temukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Di dalam tabel tersebut ditemukan bahwa beberapa data tentang kondisi aset ada yang tidak berisi di karenakan pada tahun 2021-2022 OPD tersebut belum menginput data dan belum melakukan rekonsiliasi data ke dalam aplikasi website SIPKD modul aset sehingga Badan pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Kampar tidak bisa melakukan penatausahaan dalam melakukan pencatatan terhadap aset kendaraan tersebut.

Permasalahan pengelolaan barang milik Negara/Daerah juga terjadi pada pemerintah daerah lainnya, seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti dari hasil penelitian Fitri Wulandari Program SI Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim pekan baru tahun 2019 mengungkapkan bahwa “Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan

dengan baik dilihat dari pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan dengan hambatan yang terdapat dalam pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menurut (Creswell, 2016) adalah jenis penelitian yang menjelaskan dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Sehingga dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, atau kesenjangan sosial yang timbul (Lexy J. Moleong, 2004).

Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif ialah untuk dapat menemukan dan memahami apa saja yang tersembunyi di suatu keadaan yang terjadi serta sulit untuk di mengerti. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus ini sangat tepat dipakai sebagai metode untuk mengetahui dengan cara mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan bermacam prosedur pengumpulan data seperti kejadian, aktivitas, proses dan program berdasarkan waktu yang telah ditetapkan..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar

1. Dalam upaya melindungi barang milik daerah Kabupaten Kampar maka wajib melakukan pengelolaan aset secara maksimal dan optimal. Terutama dalam bidang penginventarisasi barang. maka dari itu pemerintah Kabupaten Kampar menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar. Didalam bab lima ini menjelaskan terkait tentang hasil yang ditemukan oleh peneliti di lokasi penelitian yang berkaitan tentang persoalan-persoalan yang ditemukan peneliti dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Kampar No.14 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah di Kabupaten Kampar melalui hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang penulis dapatkan. Batasan yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi peraturan daerah Kabupaten Kampar No 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.

Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui Untuk mengetahui Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar dengan menggunakan teori George Edward III.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar

Dalam penelitian ini pengelolaan barang milik Daerah di Kabupaten Kampar terdapat banyak permasalahan yaitu banyak nya di temui aset kendaraan dalam kondisi rusak, berstatus hilang dan di gunakan pihak lain serta aset pertanahan Kampar lebih banyak di hibahkan daripada di manfaatkan seperti pinjam pakai dan lain sebagainya. Aset yang tidak produktif tersebut pada akhirnya akan menimbulkan persoalan baru, karena aset kehilangan nilai produktifnya dan potensi ekonomi dan akan semakin membebani keuangan daerah Kampar.

Aset-aset yang menganggur atau tidak produktif itu harus diberdayakan menjadi aset yang produktif dan bernilai ekonomi yang akan memberikan pemasukan keuangan daerah Kampar dan mengurangi beban biaya pemeliharaan.

4. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar belum optimal dapat dilihat dari sumber daya manusia yang belum optimal di karenakan kebanyakan pegawai di lingkup belum bisa mengoperasikan perangkat lunak lain nya. Struktur birokrasi khusus pengelolaan aset belum

berjalan dengan optimal dan maksimal dalam mengelola aset karena organisasi perangkat daerah belum melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap aset yang dimiliki dengan maksimal. Komunikasi sudah optimal antara BPKAD dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam melakukan pentausahaan aset selanjutnya Disposisi sudah optimal antara seluruh perangkat di BPKAD khususnya dalam pengelolaan aset.

2. Adapun faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu Penatausahaan dalam administrasi dokumen baik secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi SIPKD modul aset masih lemah dan belum berjalan dengan baik dan sumber daya manusia di ruang lingkup BPKAD belum optimal pada saat melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi website SIPKD.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Solichin. (2008). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara.

Arikunto Suharsimi. (2013). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. In Jakarta: Rineka Cipta (p. 172). Rineka Cipta.
<http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>

Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (4th ed). Pustaka Belajar.

Dadang, M., Sujianto, Zaili, R., Harapan, T., Febri, Y., Adianto, Ernawati, Hasim, A., Mayarni, Abdul, S., Zulkarnaini, Nur, L. M., Mimin, S. N., Geovani, M., & Syofian. (2019). Pedoman Penyusunan SKRIPSI Administrasi Publik.

Doli D. Siregar. (2002). Optimalisasi pemberdayaan harta kekayaan negara : peran konsultan penilai dalam pemulihan ekonomi nasional. Gramedia Pustaka Utama.
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=16807>

Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.

Kadji, Y. (2016). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas (Pertama, Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>

Lexy J. Moleong. (2004). metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Suwanda, D. (2013). Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda. PPM Manajemen.

Ulber, S. (2009). Metode Penelitian Sosial. PT. Refika Aditama.

Jurnal

- ABBAS DZUL FIKRI, M. (2016). *IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TERHADAP PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN (STUDI PADA BPKAD KABUPATEN BONDOWOSO)*. 1–46.
- Adhi, S. (2017). *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Sebagai Sumber Pad Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013 – 2015*. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 38–43. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1633>
- Kaspul, K., & Zulkarnaini, Z. (2022). *Implementasi Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru Pendahuluan Metode Hasil dan Pembahasan*. *Universitas Riau*, 2(1), 33–36.
- Noviawati, E. (2016). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.410>
- Noviayanti Siana, H. (2013). *Manajemen Aset Daerah studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja*. *Skripsi. Makassar : Universitas Hasanuddin*.
- Rakhmadhoni, N. S. (2017). *Manajemen Aset Dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Kantor BPKAD Kabupaten Nabire –PAPUA*. *Undergraduate (S1) Thesis, University of Muhammadiyah Malang*, 1–14.
- WULANDARI, F. (2019). *PENGELOLAAN ASET DAERAH ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI*. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.